



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021 – 2026



Rencana Strategis RENSTRA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



2021 - 2026

DAFTAR ISI

Daftar isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	9
2.1	Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya Sekretariat Daerah	13
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	20
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	28
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	30
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	27
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	32
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	35
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	46
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII	PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	14
Tabel 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan	27
Tabel 3.1	Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026	46
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan	48
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan	49
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	11
Gambar 2	Struktur Organisasi Asisten I	12
Gambar 3	Struktur Organisasi Asisten II	12
Gambar 4	Struktur Organisasi Asisten III	13

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026. Dalam rangka mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2021-2026. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Painan, 2021

**Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Drs. LUHUR BUDIANDA SY M.Si
NIP. 197301006 198908 1 001**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses-proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rencana Stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab atau bagian, dengan berpedoman kepada Ranperbup Renstra 2021-2026, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Faktor-faktor Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat penjelasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan Renstra, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut

BAB II**GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH****2.1. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

2.1.1. Tujuan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Mengacu pada struktur organisasi, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh Bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi tiga (3) Asisten yaitu :

- a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** yang membawahi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Hukum, Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum serta

Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi dukcapil, Keagamaan, Kecamatan dan penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan** yang membawahi Bagian Pembangunan dan Infrastruktur, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan serta pengkoordinasian Perangkat Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum** yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Humas dan Protokoler, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang administrasi umum kesekretariatan yang meliputi bidang organisasi perangkat daerah, umum, hukum, humas dan aset serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

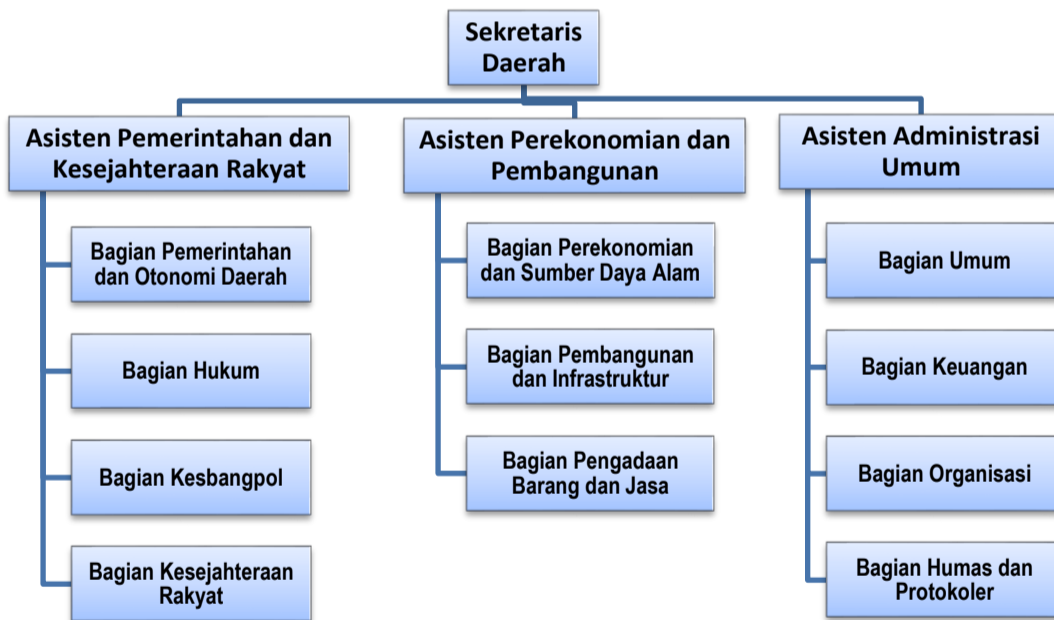
2.1.3. Struktur Organisasi

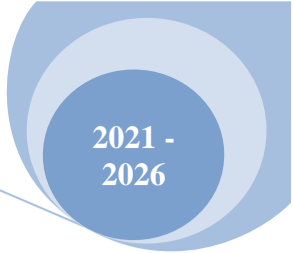
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu tiga Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing masing asisten membawahi bagian-bagian sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang dibagi menurut Asisten Masing-masing. Bagian-bagian yang berada di Sekretariat :

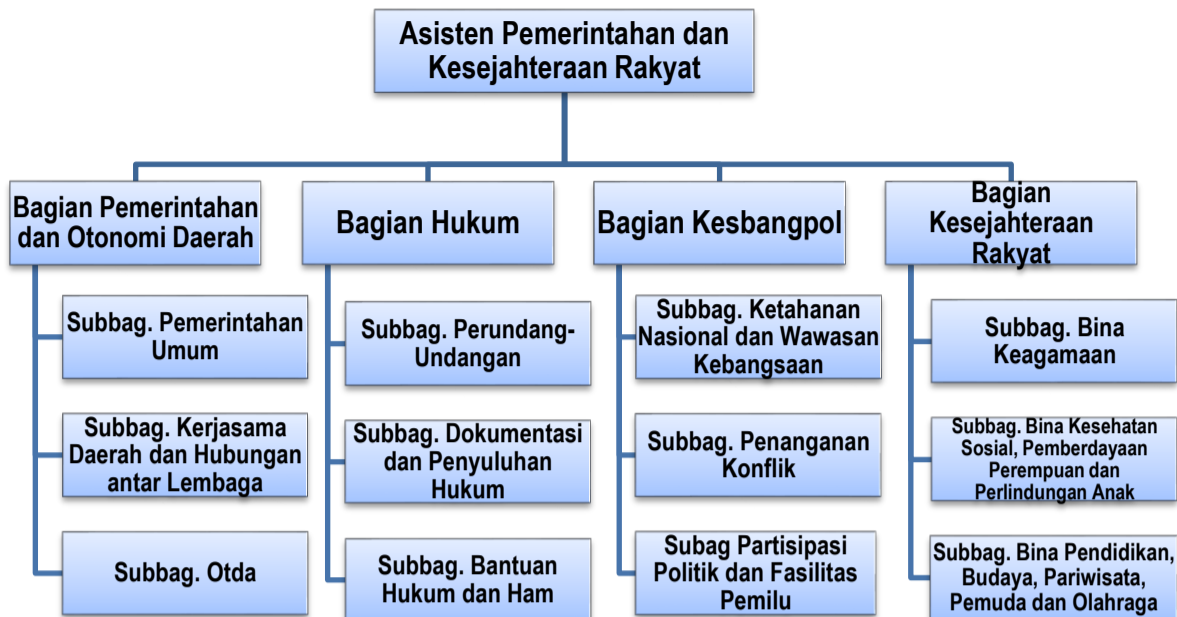
- a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- f. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
- g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Bagian Umum
- i. Bagian Humas dan Protokoler
- j. Bagian Keuangan
- k. Bagian Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

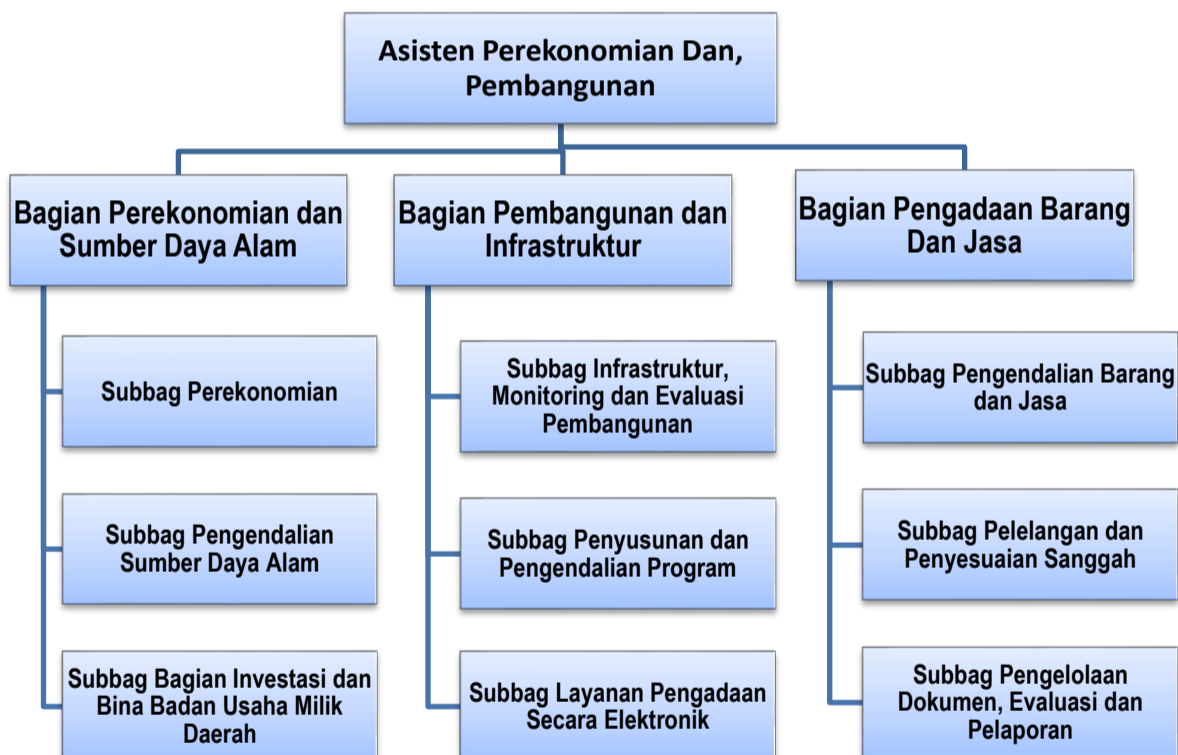




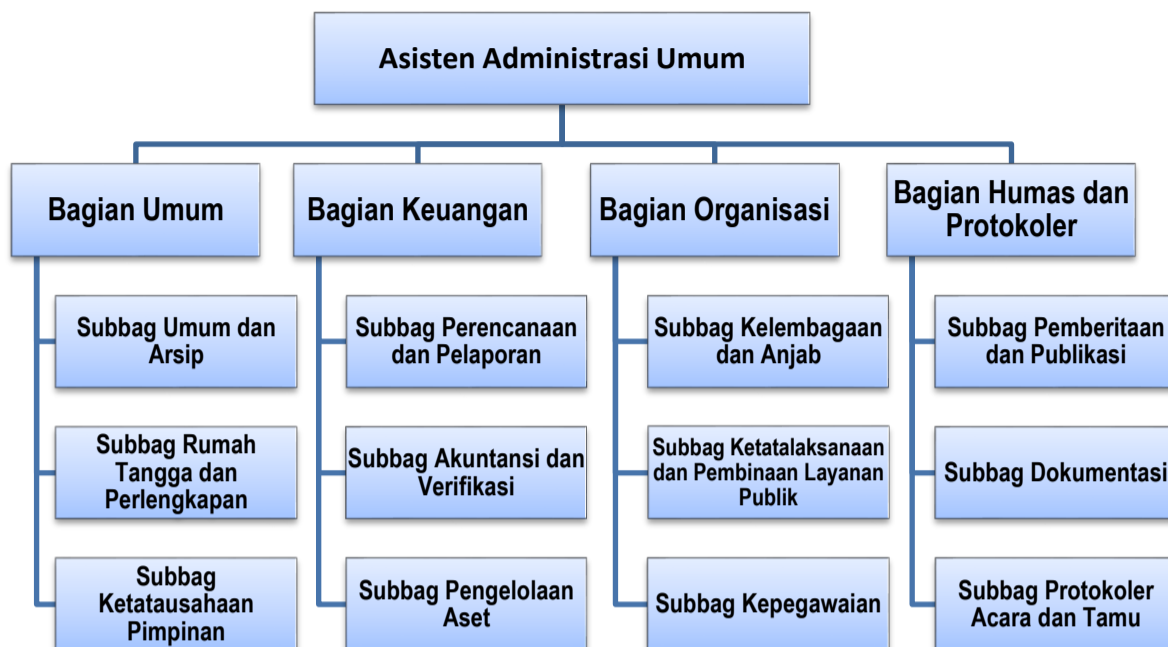
Gambar 2
Struktur Organisasi Asisten I



Gambar 3
Struktur Organisasi Asisten II



Gambar 4
Struktur Organisasi Asisten III



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dan pelaksana pengendalian pembangunan.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal 2021 sebanyak 115 (Seratus lima belas) orang, dengan rincian dapat dilihat dari berbagai pendekatan sebagaimana tergambar dalam table-tabel berikut antara lain :

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN GOLONGAN

No	UNIT KERJA	JML					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	-	-	6	6
2.	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	-	-	7	2	9
3.	Bag. Hukum	2	-	-	6	1	7
4.	Bag. Kesbangpol	2	-	3	4	1	8
5.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	5	-	1	10	-	11

No	UNIT KERJA	JML					
		Non PNS	I	II	III	IV	Jumlah
6.	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur	-	-	-	4	2	6
7.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	-	1	6	2	9
8.	Bag. Kesra	3	-	1	5	1	7
9.	Bag. Umum	41	-	7	13	-	20
10.	Bag. Organisasi	1	-	2	6	1	9
11.	Bagian Keuangan	-	-	1	11	1	13
12.	Bagian Humas	6	-	5	4	1	10
JUMLAH		64	0	21	76	18	115

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		DASAR	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	-	-	-	6	6
2.	Bag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	-	-	-	6	3	9
3.	Bag. Hukum	-	-	-	-	6	1	7
4.	Bag. Kesbang Pol	-	-	3	-	3	2	8
5.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	1	9	-	11
6.	Bag. Pembangunan dan Infrastruktur	-	-	-	-	4	2	6
7.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	1	-	3	5	9
8.	Bag. Kesra	-	-	1	1	2	3	7
9.	Bag. Umum	-	-	7	2	10	1	20
10.	Bag. Organisasi	-	-	2	-	5	2	9
11.	Bagian Keuangan	-	-	1	2	8	2	13
12.	Bagian Humas	-	-	4	1	2	3	10
JUMLAH		0	0	20	7	58	30	115

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2021 untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

TABEL 2.3
SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	3
2	Tanah Bangunan Pasar	1
3	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	1
4	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	1
5	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2

No.	Nama Barang	Jumlah
6	Tanah Jaringan/Saluran	1
7	Lain-lain	1
8	Tanah Jalan	9
9	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1
10	Mini Bus	24
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	13
12	Pick Up	1
13	Sepeda Motor	53
14	Sepeda	4
15	GPS (Global Positioning System)	1
16	Lemari Penyimpanan	20
17	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	10
18	Mesin Penghitung Uang	1
19	Mesin Foto Copy dengan keras Folio	2
20	Mesin Photo Copi dengan kertas biasa Folio	2
21	Lemari Besi/Metal	34
22	Filling Besi/Metal	41
23	Lemari Penyimpanan	13
24	Peti Uang	4
25	Lemari Kaca	5
26	Lemari Makan	10
27	Papan Visuil	4
28	Alat Penghancur Kertas	2
29	Mesin Absensi	3
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	43
31	Mesin Penghancur Kertas	17
32	Meja Biro	40
33	Kursi Biro	8
34	Generator Set	9
35	Stabilizer	17
36	Mesin Potong Rumput	2
37	Stand Mix	6
38	Stand Speaker	1
39	Multi Media Pembelajaran Interaktif	3
40	Lampu Emergency	2
41	Bendera Merah Putih	1
42	Besi Pengaman Genset Kantor	1
43	Papan Informasi	12
44	Proyektor/Infocus	9
45	Peralatan Olahraga	8
46	Umbul-Umbul / Marawa	1
47	Lemari Kayu	4
48	Rak Kayu	2
49	Meja Kayu/Rotan	1
50	Kursi Besi / Metal	4
51	Rak Kaca	1
52	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	3
53	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	21
54	Meja Rapat	20
55	Meja Makan	9

No.	Nama Barang	Jumlah
56	Meja Kerja Staf	15
57	Meja Panjang	18
58	Meja Bundar	21
59	Kursi Rapat	11
60	Kursi Tamu	32
61	Kursi Putar	1
62	Kursi Biasa	3
63	Meja Komputer	4
64	Kasur	159
65	Selimut Wool	3
66	Meja 1/2 Biro	97
67	Sofa	11
68	Lemari Pakaian	15
69	Lemari Rias	1
70	Nakas	9
71	Meja Rias	8
72	Locker	2
73	Spring Bed	9
74	Lemari Pajang	6
75	Lemari Gantung	2
76	Rak Piring	3
77	Rak Sepatu	6
78	Rak Buku	2
79	lemari sekat	1
80	Meja TV	1
81	Springbed	6
82	Kursi Kerja Staf	6
83	Kulkas	9
84	jemuran kain besar	2
85	Kursi Tunggu	6
86	Meja Sudut	1
87	Kursi Makan	2
88	Jam dinding	5
89	Mesin Potong Rumput	1
90	Mesin Cuci	6
91	Exsos Fan (Alat Penyaring Udara)	1
92	AC Sentral	17
93	AC Unit	53
94	AC Split	15
95	Kipas Angin	77
96	Kompor Listrik	1
97	Kompor Gas	18
98	Teko Listrik	2
99	Kuali	5
100	Alat Dapur Lainnya	48
101	Tabung Gas	26
102	Juicer	14
103	Rice Cooker	16
104	Piring	25
105	Mangkok (Alat Rumah Tangga)	13

No.	Nama Barang	Jumlah
106	Rak Handuk	1
107	Termos	4
108	Gelas	1
109	Blender	8
110	Sendok	5
111	Toples	3
112	Troli Makanan	3
113	Lemari Piring	1
114	Alat Pemanas	16
115	Televisi	42
116	Amplifiler	1
117	Sound System	7
118	Sekat/Pembatas Ruangan	1
119	Gantungan	6
120	Kotak Saran	2
121	Baliho	1
122	Vacum Cleaner	4
123	Water Heater	3
124	Wireless	9
125	Tong Sampah	1
126	Home Theater	3
127	Mini Bar	2
128	Sarung Kursi	1
129	Kamar Set	4
130	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
131	Camera Video	4
132	Camera Film	1
133	Alat Hiasan	69
134	Seterika	3
135	Tangga Alumunium	3
136	Kaca Rias	6
137	Dispencer	31
138	Mimbar/Podium	2
139	Handy Cam	1
140	Gorden	19
141	Kasur	3
142	Bantal	1
143	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	13
144	Tangki Air	2
145	Lampu Hias	26
146	Digital Receiver	4
147	Receiver	6
148	Water Heater	1
149	Karpet	143
150	Bad Cover	40
151	Tempat Jemuran	1
152	Mesin Pompa Air	1
153	Pisau Dapur	1
154	Mixer	8
155	Teko	1

No.	Nama Barang	Jumlah
156	Pemanggang Kue	3
157	Ransang	3
158	Alas Kasur	22
159	Alas Meja	78
160	Cambung	5
161	Selang Gas	2
162	Handuk	1
163	Keset	1
164	Racun Api (Pemadam Kebakaran)	13
165	Mini Komputer	1
166	Komputer	62
167	Lap Top	43
168	Note Book	29
169	I PAD	20
170	VGA	1
171	Swicht Distribution	1
172	Swicht Core	1
173	Speaker Komputer	1
174	Printer	29
175	Hard Disk Eksternal	32
176	Mouse	1
177	Monitor	1
178	Printer	57
179	Scanner	3
180	Flash disc	1
181	Server	8
182	Router	8
183	Hub	1
184	Kabel LAN	7
185	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1
186	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
187	Meja Tamu Biasa	4
188	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1
189	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
190	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	16
191	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
192	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I /Wkl Gub/Bup/Walikota	1
193	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	19
194	Proyektor + Attachment	3
195	Microphone	12
196	Speaker Ramsa	9
197	Audio Mixer	1
198	DVD	1
199	Voice Recorder	1
200	Toa / Corong Mix	2
201	Camera Video	7
202	Power Mixer	2
203	Peralatan Band	25
204	Equalizer	1
205	Sound System	13

No.	Nama Barang	Jumlah
206	Microphone/Wireless Mic	11
207	Battery Charger	1
208	Tape	3
209	Mixer Beringer	2
210	Handycam	1
211	Camera Digital	16
212	Speaker Aktive	6
213	Snac Cable	1
214	Kabel Audio	6
215	Rak Peralatan	1
216	Camera Adaptor	1
217	Warless	2
218	Amplifier	1
219	Sound System	11
220	Telephone (PABX)	7
221	Telephone Mobile	2
222	Faximile	2
223	Wireless	6
224	Rambu-rambu Perbatasan	1
225	Lain-lain	1
226	Sepeda Statis	4
227	Alat Ukur Kolesterol	2
228	Orgen/Electrone	2
229	Lain-lain	2
230	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
231	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
232	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1
233	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	5
234	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1
235	Gedung Pos Jaga Permanen	2
236	Gedung Garasi/Pool Permanen	1
237	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
238	Bangunan Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan)	1
239	Bangunan Parkir Permanen	1
240	Bangunan Parkir Permanen	1
241	Rumah Dinas Golongan I	2
242	Lain-lain	2
243	Rumah Dinas Kepala SKPD	1
244	Lain-lain	1
245	Pagar Rumah Dinas	1
246	Jalan Khusus Kantor	1
247	Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek)	2
248	Lain-lain	1
249	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	1
250	Jaringan Listrik Kantor/Rumah	1
251	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	12
252	Buku Lembaran Daerah	200
253	Buku Peraturan Perundang-undangan	228
254	Buku Pustaka	1
255	Lain-lain	1

No.	Nama Barang	Jumlah
256	Photo	8
257	Talempong	53
258	Aneka Tanaman Hias	15
259	Software/Aplikasi.	2

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016 - 2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.4
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	(5)	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah				C	B	BB		BB	BB	C	B	B	B	B		90%	90%	90%	90%	90%		Belum Tercapai
2	Nilai LPPD				3037	3130	3180		3230	3300	3037	3130	3009	32090	3230		90%	90%	90%	90%	90%		Tercapai
3	Nilai OPD yang pengelolaan Pelayanan Publik baik				C	B	BB		BB	A	B	B	B	B	B		100%	100%	90%	90%	90%		Belum Tercapai
4	Persentase jumlah jabatan dan eselonering yang terisi				80%	80%	90%		95%	100%	80%	80%	90%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
5	Persentase Aparatur yang berkompeten				85%	85%	90%		95%	100%	85%	85%	90%	90%	95%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
6	Persentase ORMAS terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang undangan				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	85%	90%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
7	Persentase terfasilitasinya pengacuan pencairan				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	dan bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan partai politik																						
8	Persentase konflik yang tertangani				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
9	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
10	Persentase Produk hukum Daerah yg difasilitasi				85%	90%	90%		95%	95%	85%	90%	90%	95%	95%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
11	Jumlah perkara yang tertangani				6 perkara	6 perkara	6 perkara		6 perkara	6 perkara	6 perkara	6 perkara	6 perkara	6 perkara	6 perkara		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
12	Persentase penyebaran informasi lembaran daerah dan berita daerah				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
13	Persentase pelaksanaan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	(5)	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	koordinasi antar SKPD dan propinsi																						
14	Persentase layanan pengadaan secara elektronik				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
15	Persentase aparatur yg mempedomani pedoman pelaksanaan kegiatan APBD				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
16	Persentase kegiatan pemerintah daerah yg dipublikasikan				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
17	Persentase kegiatan pemerintah daerah yg terdokumentasikan				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
18	Persentase peningkatan layanan keprotokoleraan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
19	Persentase peningkatan layanan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	(5)	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	keprotokolera n																						
20	Persentase penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
21	Jumlah kerjasama antar daerah				1 MOU	1 MOU	2 MOU		2 MOU	2 MOU	1 MOU	1 MOU	2 MOU	2 MOU	2 MOU		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
22	Jumlah penetapan batas administrasi pemerintahan				6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari		6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
23	Persentase arsip Setda yg ditata dg baik				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
24	Persentase pengelolaan ketatausahaan pimpinan				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
25	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sekretaris daerah dan sarana prasarana sekretariat				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	(5)	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	daerah																						
26	Persentase peningkatan keberhasilan lelang				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
27	Persentase pembinaan barang dan jasa OPD				80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
28	Persentase pengelolaan dokumen PBJ				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
29	persentase peningkatan pengendalian SDA				5%	5%	5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
30	Persentase layanan bidang perekonomian				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
31	Persentase layanan bidang investasi dan BUMD/BUMN /LKM				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
32	Persentase peningkatan pembinaan keagamaan, dan Kesra				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
33	Peringkat MTQ Tingkat				7 besar	6 besar	5 besar		5 besar	5 besar	7 besa	6 besar	6 besar	12 besar	12 besa		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

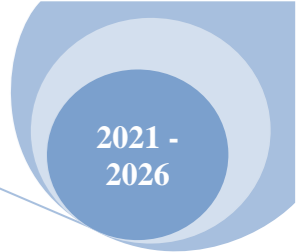
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						Ket.
					2016	2017	2018	(5)	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Propinsi										r				r								
34	Persentase fasilitas keagamaan dan Kesra				100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai
35	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika (kelompok)				31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba		31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba	31 kelompok anti Narkoba		100%	100%	100%	100%	100%		Tercapai

Indikator yang belum tercapai antara lain :

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
2. Nilai OPD yang pengelolaan Pelayanan Publik baik

Faktornya antara lain :

1. Keterbatasannya Anggaran , karena terjadi refocusing.
2. Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat laporan terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.



TABEL 2.5

PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH																				
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021																				
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Setda	43.646.502.961	37.330.717.110	35.707.435.765,20	35.146.762.451,10	24.816.713.699,22	29.617.928.669	39.352.117.730	35.302.774.850	34.311.950.544	33.886.619.304	23.837.487.664	15.783.362.090	90,16	94,57	96,09	96,41	96,05	53,29	-6,09 %	-15,56 %

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pesentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	76 (Baik)	78 (Baik)	77,29 (Baik)	82,301 (Baik)	90 (Baik)
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	85%	90%	90%	95%	95%
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	80%	80%	80%	80%	80%
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	B	B	B	B
6	Nilai LPPD	3037	3130	3.009	32,090	32,30
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	7 besar	6 besar	6 besar	12 besar	12 besar
8	Persentase TPQ Aktif (%)	80	80	95	95	100
9	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika (kelompok)	31 Kelompok	31 kelompok	31 kelompok	31 kelompok	31 kelompok
10	Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	80%	80%	80%	85%	90%
11	Indeks Kepuasan masyarakat	C	B	B	B	B
12	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	22,30	65,62	95,00	95	100
13	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	70	75	97	91	100
14	Laju Inflasi	4,2	3,8	2,60	1,7	0,7

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 sampai dengan 2026 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;

6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

Untuk menjawab tantangan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program/Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Dalam hal kebijakan pada Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebesar 66,88 katagori B = Baik.
2. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
3. Peraturan yang ada belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
4. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
5. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten.
6. Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
7. Masih rendahnya Budaya Kerja;
8. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan;
9. Belum optimalnya pengawasan, legislasi dan perencanaan penganggaran yang efisien;
10. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku;
11. Belum optimalnya pembinaah kewilayahan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan sampai ketingkat nagari.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Perangkat Daerah.
2. Terdapatnya Kegiatan yang tumpang tindih (*overlapping*).

3. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa masih rendah.
4. Masih lemahnya perencanaan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
2. Belum optimalnya penataan kelembagaan sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
2. Sering terlambatnya petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH
SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL
DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Sejahtera	:	Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Maju	:	Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
Bermartabat	:	Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)
Akuntabel	:	Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
Profesional	:	Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG**

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD Nasional Tahun 2021-2026 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Rumusan Misi Sekretariat Daerah adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja,

Indikator tujuan : Skor LPPD, Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran :

- Meningkatnya Nilai LPPD.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya nilai pelayanan publik OPD pelayanan.
- Meningkatnya layanan pembentukan produk hukum.
- Meningkatnya Layanan Publikasi
- Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.

Tujuan : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Indikator tujuan : Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla.

Sasaran :

- Meningkatnya pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
- Meningkatnya pembinaan TPQ Aktif
- Persentase yang memenuhi kewajiban membayar zakat

3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan

Indikator tujuan : Nilai investasi Swasta dan Masyarakat

Sasaran :

- Nilai investasi Swasta dan Masyarakat

4. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis

Tujuan : Meningkatkan Keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.

Indikator tujuan : Persentase Konflik yang tertangani

Sasaran :

- Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat pada forum komunikasi publik dan partai politik.

Berdasarkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan untuk memenuhi harapan dari misi di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan sinkronisasi isu-isu strategis yang terjadi di ditingkat nasional dan dan propinsi untuk dijadikan bahan acuan.

Sinkronisasi isu-isu strategis tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
SINKRONISASI ISU STRATEGIS NASIONAL, PROPINSI SUMATERA BARAT DAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
1.	Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan: transformasi structural berjalan, produktifitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi kondusif dan GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055	Pemerataan dan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi ibu, anak, pemuda, dan penduduk lansia	Pembangunan Manusia:
2	Sejahtera dapat diwujudkan dengan: kualitas hidup meningkat, Perilaku disiplin dan beradab, SDM berkualitas dan berdaya saing, dan indeks kebahagiaan meningkat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Pembangunan ekonomi:
3	Adil dapat diwujudkan dengan: ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan baik	Kewenangan Propinsi pada SLTA, sedangkan TK hingga SLTP adalah daerah membutuhkan koordinasi dan sinergi antar tingkat pemerintahan	Pembangunan kewilayahan
4	Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan: memperhatikan daya dukung dan daya tampung (<i>Low Carbon Development</i>) dan selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional	Pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dasar	Pembangunan Infrastruktur
5		Keterlibatan dan kunjungan dalam pertunjukan seni daerah, mengunjungi peninggalan sejarah, mengembangkan dan menggunakan produk tradisonal daerah	Pembangunan Polhukkamhan:
6		mengunjungi perpustakaan dan museum, terlibat dalam kegiatan seni, upacara adat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
7		mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar-suku dan agama	
8		mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar-suku dan agama	
9		Pendapatan petani dan nilai tukar petani mengalami gejolak. Stabilitas harga komoditi pertanian	
10		Akses dan penggunaan benih unggul	
11		Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi hasil pertanian	
12		Ketersediaan, distribusi dan konsumsi untuk swasembada dan diversifikasi pertanian dan pangan, termasuk hasil peternakan dan perikanan	
13		Mengoptimalkan pengembangan potensi hutan kemasyarakatan	
14		Persoalan kelembagaan (sinkronisasi dan koordinasi) OPD antara lingkup pertanian, vertical dan horizontal.	
15		Akses pelaku sektor perdagangan UMKM kepada permodalan dengan tumbuhnya komitmen pembiayaan pada UMKM oleh lembaga bank dan non-bank	
16		Peningkatan pelatihan dan keterampilan, dan inovasi pelaku UMKM	
17		Berkembang cepatnya perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>) dalam produk perdagangan. Peningkatan penyerapan kapasitas teknologi komunikasi informatika, dan jaringan pemasaran	
18		Memfasilitasi tumbuhnya angkatan kerja dengan memfasilitasi start up,	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
		wirausahawan milenial, women entrepreneur	
19		Pasar pariwisata masih lokal membutuhkan ekspose yang lebih luas	
20		Akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana serta atraksi di Kawasan objek/destinasi wisata.	
21		Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata.	
22		Penciptaan ekosistem ekonomi kreatif.	
23		Peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.	
24		Kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan dan akses kesentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	
25		Konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.	
26		Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas	
27		Infrastruktur dukungan pengelolaan persampahan	
28		Peningkatan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas	
29		Kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelyanan public secara eelektronik.	
30		Pemanfaatan beragam media termasuk kanal	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
		sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.	

Isu Strategis Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Tujuan pembangunan nasional RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Tema pembangunan yang dipilih untuk RPJMN 2020 – 2024 adalah **“Indonesia berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan berkesinambungan”**. Tema ini diuraikan sebagai berikut:

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan: transformasi struktural berjalan, produktifitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi kondusif dan GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan: kualitas hidup meningkat, Perilaku disiplin dan beradab, SDM berkualitas dan berdaya saing, dan indeks kebahagiaanmeningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan: ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan: memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*) dan selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Beberapa permasalahan dan isu- isu strategis Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Pemerataan dan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi ibu, anak, pemuda, dan penduduk lansia
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Kewenangan Propinsi pada SLTA, sedangkan TK hingga SLTP adalah daerahmembutuhkan koordinasi dan sinergi antar tingkat pemerintahan
4. Pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dasar.
5. Keterlibatan dan kunjungan dalam pertunjukan seni daerah, mengunjungi peninggalan sejarah, mengembangkan dan menggunakan produk tradisonal daerah.
6. mengunjungi perpustakaan dan museum, terlibat dalam kegiatan seni,

- upacara adat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan,
7. mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar-suku dan agama.
 8. Pendapatan petani dan nilai tukar petani mengalami gejolak. Stabilitas harga komoditi pertanian.
 9. Akses dan penggunaan benih unggul.
 10. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi hasil pertanian.
 11. Ketersediaan, distribusi dan konsumsi untuk swasembada dan diversifikasi pertanian dan pangan, termasuk hasil peternakan dan perikanan.
 12. Mengoptimalkan pengembangan potensi hutan kemasyarakatan.
 13. Persoalan kelembagaan (sinkronisasi dan koordinasi) OPD antara lingkup pertanian, vertical dan horizontal.
 14. Akses pelaku sektor perdagangan UMKM kepada permodalan dengan tumbuhnya komitmen pembiayaan pada UMKM oleh lembaga bank dan non- bank
 15. Peningkatan pelatihan dan keterampilan, dan inovasi pelaku UMKM
 16. Berkembang cepatnya perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam produk perdagangan. Peningkatan penyerapan kapasitas teknologi komunikasi informatika, dan jaringan pemasaran
 17. Memfasilitasi tumbuhnya angkatan kerja dengan memfasilitasi start up, wirausahawan milenial, women entrepreneur.
 18. Pasar pariwisata masih lokal membutuhkan ekspose yang lebih luas
 19. Akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana serta atraksi di Kawasan objek/destinasi wisata.
 20. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata.
 21. Penciptaan ekosistem ekonomi kreatif.
 22. Peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.
 23. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan dan akses kesentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
 24. Konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi.
 25. Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana dan pengembangan ketangguhan bencana berbasis komunitas
 26. Infrastruktur dukungan pengelolaan persampahan
 27. Peningkatan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas

28. Kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan public secara eelektronik.
29. Pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

Isu strategis dalam RPJMD teknokratik Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - a. Pelayanan Dasar
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - a. Pangan
 - b. Energi
 - c. Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - d. Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - a. Sentra Pertumbuhan
 - b. Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber Daya Air, Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - a. Hukum dan Regulasi
 - b. Hankam
 - c. Politik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Perangkat Daerah yang fungsi utamanya adalah fungsi koordinasi maka pelaksanaan program dan kegiatan di sekretariat daerah secara teknis tidak berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup. Mengingat isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisa data dan informasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan isu-isu strategis sebagai permasalahan utama yang sedang dan akan dihadapi lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya

yang signifikan bagi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa mendatang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review Renstra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 serta permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai visi-misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Kelembagaan yang belum optimal, efektif dan efisien.
2. Perlunya penyempurnaan SPM dan SOP.
3. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku.
4. Kompetensi SDM masih rendah.
5. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana beroritasi pada Teknologi Informasi.
6. Belum optimalnya penerapan *Reward* dan *Punishment* memotivasi aparatur dalam meningkatkan kinerjanya.
7. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
8. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
9. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah.

Implikasi isu-isu strategis tersebut terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan

kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan kaidah *good governance* dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan sampai ketinggian nagari.
3. Penerapan kebijakan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap permasalahan daerah.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.
5. Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan tugas administrasi dan umum.
8. Peningkatan kinerja pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
9. Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas aparatur dengan pembinaan teknis dan administrasi bagi aparatur.
10. Peningkatan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD.
11. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.
12. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal.
13. Peningkatan koordinasi internal Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja yang saling bersinergi.

14. Peningkatan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui unjuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan		Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (BB)	70,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi	Nilai SAKIP	68,00 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
			Skor LPPD	3,209	3,215	3,223	3,229	3,234	3,240
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public	80 (BB)	82 (BB)	84 (BB)	85 (BB)	85 (BB)	85 (BB)
2	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing		Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	Rendah (≤10 orang)	Rendah (≤10 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	tinggi (≥21 orang)	tinggi (≥21 orang)
			Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%
3	Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis		Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Peran serta aparat Pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI I : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke pemerintahan terendah dengan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan	Menyediakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah, dan penilaian Reformasi Birokrasi pemerintah
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Melakukan restrukturisasi kelembagaan, kewenangan , SOP, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
		Melakukan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Menilai, menyusun laporan penilain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing			
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan Pembinaan Keagamaan
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan dinamis			
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang	Meningkatnya Peran serta aparat Pemerintah dan tokoh	Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya kerukunan dan toleransi kehidupan beragama

aman, tentram dan dinam	masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		
----------------------------	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering, revitalisasi, restrukturisasi* birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2021-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2021–2026 terbagi pada 11 (Sebelas) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan				Indeks Reformasi dan Birokrasi	B (56)	B (56)		B (58)		B (60)		B (62)		B (64)		B (65)		B (65)		
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja			Skor LPPD	3.209	3.209		3.215		3.223		3.229		3.234		3.240		3.240		
				Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	66,88 (B)	68,00 (BB)		70,00 (BB)		72,00 (BB)		75,00 (BB)		76,00 (BB)		78,00 (BB)		78,00 (BB)		
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80.00)	B (80.00)		B (82.00)		B (84.00)		B (85.00)		B (85.00)		B (85.00)		B (85.00)		
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		4 01	SEKRETARIAT DAERAH				38,276,740,531		42,104,414,584		46,314,856,043		50,946,341,647		56,040,975,811		61,645,073,393		295,328,402,008	
		4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	80%	80%	24,526,330,984	80%	26,978,964,082	80%	29,676,860,491	80%	32,644,546,540	80%	35,909,001,194	80%	39,499,901,313	80%	189,235,604,603	SEKRETARIAT DAERAH
		4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	12 Bulan	100%	124,565,558	100%	137,022,114	100%	150,724,325	100%	165,796,758	100%	182,376,433	100%	200,614,077	100%	961,099,265	
		4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran yang diterbitkan sekretariat daerah	4 dokumen	4 dokumen	124,565,558	4 dokumen	137,022,114	4 dokumen	150,724,325	4 dokumen	165,796,758	4 dokumen	182,376,433	4 dokumen	200,614,077	4 dokumen	961,099,265	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	100%	14,020,115,964	100%	15,422,127,560	100%	16,964,340,316	100%	18,660,774,348	100%	20,526,851,783	100%	22,579,536,961	100%	108,173,746,933	
		4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN sekretariat daerah yang dibayarkan gaji dan tunjangan setiap	12 Bulan	123 ASN	13,828,332,539	123 ASN	15,211,165,793	123 ASN	16,732,282,372	123 ASN	18,405,510,609	123 ASN	20,246,061,670	123 ASN	22,270,667,837	123 ASN	106,694,020,821	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima honor pengelola keuangan Sekretariat Daerah	12 Bulan	18 orang	142,172,451	18 orang	156,389,696	18 orang	172,028,666	18 orang	189,231,532	18 orang	208,154,686	18 orang	228,970,154	18 orang	1,096,947,185	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disusun selama satu tahun	12 Bulan	12 Laporan	49,610,974	12 Laporan	54,572,071	12 Laporan	60,029,279	12 Laporan	66,032,206	12 Laporan	72,635,427	12 Laporan	79,898,970	12 Laporan	382,778,927	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	12 Bulan	100%	133,477,480	100%	146,825,228	100%	161,507,751	100%	177,658,526	100%	195,424,378	100%	214,966,816	100%	1,029,860,179	
		4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	12 Bulan	12 laporan	133,477,480	12 laporan	146,825,228	12 laporan	161,507,751	12 laporan	177,658,526	12 laporan	195,424,378	12 laporan	214,966,816	12 laporan	1,029,860,179	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	12 Bulan	100%	1,058,580,532	100%	1,164,438,585	100%	1,280,882,444	100%	1,408,970,688	100%	1,549,867,757	100%	1,704,854,533	100%	8,167,594,539	
		4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42,088,430	12 Bulan	46,297,273	12 Bulan	50,927,000	12 Bulan	56,019,700	12 Bulan	61,621,670	12 Bulan	67,783,837	12 Bulan	324,737,911	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	34,988,640	12 Bulan	38,487,504	12 Bulan	42,336,254	12 Bulan	46,569,880	12 Bulan	51,226,868	12 Bulan	56,349,555	12 Bulan	269,958,701	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	130,973,122	12 Bulan	144,070,434	12 Bulan	158,477,478	12 Bulan	174,325,225	12 Bulan	191,757,748	12 Bulan	210,933,523	12 Bulan	1,010,537,530	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu pemerintah daerah yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan	12 Bulan	110 Orang	258,947,090	110 Orang	284,841,799	110 Orang	313,325,979	110 Orang	344,658,577	110 Orang	379,124,434	110 Orang	417,036,878	110 Orang	1,997,934,757	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah yang dilakukan oleh ASN Sekretariat daerah	12 Bulan	150 Kali	509,935,000	150 Kali	560,928,500	150 Kali	617,021,350	150 Kali	678,723,485	150 Kali	746,595,834	150 Kali	821,255,417	150 Kali	3,934,459,585	BAGIAN KEUANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata di Sekretariat Daerah	11 Bagian	1500 Arsip	81,648,250	1500 Arsip	89,813,075	1500 Arsip	98,794,383	1500 Arsip	108,673,821	1500 Arsip	119,541,203	1500 Arsip	131,495,323	1500 Arsip	629,966,054	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulikan pada RKBM	12 Bulan	15 Unit	52,446,680	15 Unit	57,691,348	15 Unit	63,460,483	15 Unit	69,806,531	15 Unit	76,787,184	15 Unit	84,465,903	15 Unit	404,658,129	
		4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang dibeli untuk menunjang operasional kantor	12 Bulan	7 Unit	1,007,330	7 Unit	1,108,063	7 Unit	1,218,869	7 Unit	1,340,756	7 Unit	1,474,832	7 Unit	1,622,315	7 Unit	7,772,165	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dibeli untuk menunjang operasional kantor	12 Bulan	8 Unit	51,439,350	8 Unit	56,583,285	8 Unit	62,241,614	8 Unit	68,465,775	8 Unit	75,312,352	8 Unit	82,843,588	8 Unit	396,885,963	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2,066,779,571	12 Bulan	2,273,457,528	12 Bulan	2,500,803,281	12 Bulan	2,750,883,609	12 Bulan	3,025,971,970	12 Bulan	3,328,569,167	12 Bulan	15,946,465,126	
		4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang akan dikirim selama satu tahun	12 Bulan	1500 Surat	118,453,840	1500 Surat	130,299,224	1500 Surat	143,329,146	1500 Surat	157,662,061	1500 Surat	173,428,267	1500 Surat	190,771,094	1500 Surat	913,943,632	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan Rekening Listrik, Air dan Telepon untuk kebutuhan kantor	12 Bulan	12 Bulan	860,144,851	12 Bulan	946,159,336	12 Bulan	1,040,775,270	12 Bulan	1,144,852,797	12 Bulan	1,259,338,076	12 Bulan	1,385,271,884	12 Bulan	6,636,542,214	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa untuk pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	104,903,210	12 Bulan	115,393,531	12 Bulan	126,932,884	12 Bulan	139,626,173	12 Bulan	153,588,790	12 Bulan	168,947,669	12 Bulan	809,392,256	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga kontrak (Pegawai Honor) dan Cleaning Service untuk Kebersihan Kantor yang dibayar honorarnya setiap bulan	12 Bulan	40 Orang	983,277,670	40 Orang	1,081,605,437	40 Orang	1,189,765,981	40 Orang	1,308,742,579	40 Orang	1,439,616,837	40 Orang	1,583,578,520	40 Orang	7,586,587,023	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	12 Bulan	85 unit	2,364,227,660	85 unit	2,600,650,426	85 unit	2,860,715,469	85 unit	3,146,787,015	85 unit	3,461,465,717	85 unit	3,807,612,289	85 unit	18,241,458,576	
		4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipelihara	12 Bulan	4 Unit	473,971,260	4 Unit	521,368,386	4 Unit	573,505,225	4 Unit	630,855,747	4 Unit	693,941,322	4 Unit	763,335,454	4 Unit	3,656,977,393	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12 Bulan	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,008,420,990	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,109,263,089	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,220,189,398	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,342,208,338	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,476,429,171	33 Roda 4 dan 48 roda 2	1,624,072,089	33 Roda 4 dan 48 roda 2	7,780,583,075	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	12 Bulan	15 Unit	10,000,000	15 Unit	11,000,000	15 Unit	12,100,000	15 Unit	13,310,000	15 Unit	14,641,000	15 Unit	16,105,100	15 Unit	77,156,100	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dana yang tersedia untuk Biaya Perawatan Peralatan Kerja	12 Bulan	12 Bulan	229,150,160	12 Bulan	252,065,176	12 Bulan	277,271,694	12 Bulan	304,998,863	12 Bulan	335,498,749	12 Bulan	369,048,624	12 Bulan	1,768,033,266	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan gedung lainnya yang dipelihara	12 Bulan	2 unit	343,539,600	2 unit	377,893,560	2 unit	415,682,916	2 unit	457,251,208	2 unit	502,976,328	2 unit	553,273,961	2 unit	2,650,617,573	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12 Bulan	2 Unit	299,145,650	2 Unit	329,060,215	2 Unit	361,966,237	2 Unit	398,162,860	2 Unit	437,979,146	2 Unit	481,777,061	2 Unit	2,308,091,169	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	822,179,429	12 Bulan	904,397,372	12 Bulan	994,837,109	12 Bulan	1,094,320,820	12 Bulan	1,203,752,902	12 Bulan	1,324,128,192	12 Bulan	6,343,615,824	
		4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk pembayaran Gaji, Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	192,604,429	12 Bulan	211,864,872	12 Bulan	233,051,359	12 Bulan	256,356,495	12 Bulan	281,992,144	12 Bulan	310,191,359	12 Bulan	1,486,060,658	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibeli	12 Bulan	70 stel	209,575,000	70 stel	230,532,500	70 stel	253,585,750	70 stel	278,944,325	70 stel	306,838,758	70 stel	337,522,633	70 stel	1,616,998,966	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	2 Pemeriksaan	20,000,000	2 Pemeriksaan	22,000,000	2 Pemeriksaan	24,200,000	2 Pemeriksaan	26,620,000	2 Pemeriksaan	29,282,000	2 Pemeriksaan	32,210,200	2 Pemeriksaan	154,312,200	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	400,000,000	12 Bulan	440,000,000	12 Bulan	484,000,000	12 Bulan	532,400,000	12 Bulan	585,640,000	12 Bulan	644,204,000	12 Bulan	3,086,244,000	BAGIAN KEUANGAN
		4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtangga Sekretariat Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumah tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	2,338,959,380	12 Bulan	2,572,855,318	12 Bulan	2,830,140,850	12 Bulan	3,113,154,935	12 Bulan	3,424,470,428	12 Bulan	3,766,917,471	12 Bulan	18,046,498,382	
		4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,062,511,680	12 Bulan	1,168,762,848	12 Bulan	1,285,639,133	12 Bulan	1,414,203,046	12 Bulan	1,555,623,351	12 Bulan	1,711,185,686	12 Bulan	8,197,925,743	BAGIAN UMUM
		4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	790,238,900	12 Bulan	869,262,790	12 Bulan	956,189,069	12 Bulan	1,051,807,976	12 Bulan	1,156,988,773	12 Bulan	1,272,687,651	12 Bulan	6,097,175,159	BAGIAN UMUM

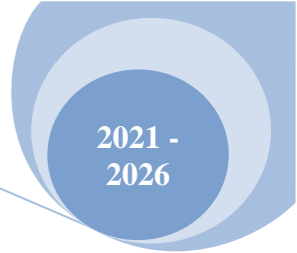
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan kecamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen/laporan penyusunan laporan penyalenggaraan pemerintahan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	52,362,922	1 Dokumen	57,599,214	1 Dokumen	63,359,136	1 Dokumen	69,695,049	1 Dokumen	76,664,554	1 Dokumen	84,331,010	1 Dokumen	404,011,885	BAGIAN TAPEM
				Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
				Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing				Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing			Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla	100%	85%		90%		95%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase yang memenuhi kewajiban membayar zakat	96.38%	96.40%		96.50%		96.60%		96.70%		96.80%		100%		100%		
		4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	12 Bulan	79 Kali	6,172,245,528	79 Kali	6,789,470,081	79 Kali	7,468,417,089	79 Kali	8,215,258,798	79 Kali	9,036,784,678	79 Kali	9,940,463,145	79 Kali	47,622,639,318	
		4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan	22 kali	22 kali	5,530,953,990	22 kali	6,084,049,389	22 kali	6,692,454,328	22 kali	7,361,699,761	22 kali	8,097,869,737	22 kali	8,907,656,710	22 kali	42,674,683,915	BAGIAN KESRA
				Jumlah jemaah haji yang difasilitasi	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		
				Jumlah kecamatan yang memiliki lembaga didikan subuh yang dibina	15 kecamatan	15 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		15 kecamatan		
				Jumlah koordinasi dan konsultasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
				Jumlah mesjid yang dikunjungi oleh tim safari tingkat provinsi	7 mesjid	7 mesjid		7 mesjid		7 mesjid		7 mesjid		7 mesjid		7 mesjid		7 mesjid		
				Jumlah safari pemerintah daerah yang dilakukan	55 kali	55 kali		55 kali		55 kali		55 kali		55 kali		55 kali		55 kali		
				Jumlah kafilah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibina	15 Hari	115 orang		15 Hari		15 Hari		15 Hari		15 Hari		15 Hari		15 Hari		
				Jumlah peringatan hari besar Islam yang dilaksanakan pemerintah daerah	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		
				Jumlah cabang MTQ tingkat provinsi yang diikuti	10 cabang	10 cabang		10 cabang		10 cabang		10 cabang		10 cabang		10 cabang		10 cabang		
				Jumlah mesjid dan ormas islam yang dibantu	Mesjid dan Ormas Islam	Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		Mesjid dan Ormas Islam		
		4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kecamatan yang mendapat bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam	15 Kecamatan	15 Kecamatan	72,634,580	15 Kecamatan	79,898,038	15 Kecamatan	87,887,842	15 Kecamatan	96,676,626	15 Kecamatan	106,344,289	15 Kecamatan	116,978,717	15 Kecamatan	560,420,092	BAGIAN KESRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah mahasiswa pengembangan kampus UNP di Pesisir Selatan (biaya pendidikan) yang dibantu		35 Mahasiswa	568,656,958	125 Mahasiswa	625,522,654	125 Mahasiswa	688,074,919	125 Mahasiswa	756,882,411	125 Mahasiswa	832,570,652	125 Mahasiswa	915,827,717	125 Mahasiswa	4,387,535,312	BAGIAN KESRA
				Jumlah Pondok Al Quran yang dibantu		4 Pondok														
		4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah sekolah yang menerima dana hibah bantuan operasional sekolah Tingkat SMA/SMK dan SLB dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		24 SMA, 8 SMK dan 3 SLB														
		4 01 02 2.03 01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	12 Bulan	100%	328,314,258	12 Bulan	361,145,684	12 Bulan	397,260,252	12 Bulan	436,986,277	12 Bulan	480,684,905	12 Bulan	528,753,396	12 Bulan	2,533,144,772	
		4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Bupati yang di Validasi	500 dokumen	500 dokumen	119,935,658	500 dokumen	131,929,224	500 dokumen	145,122,146	500 dokumen	159,634,361	500 dokumen	175,597,797	500 dokumen	193,157,577	500 dokumen	925,376,762	BAGIAN HUKUM
				Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	30 ranperbup	30 ranperbup		30 ranperbup		30 ranperbup		30 ranperbup		30 ranperbup		30 ranperbup		30 ranperbup		
				Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	6 perda	6 perda		6 perda		6 perda		6 perda		6 perda		6 perda		6 perda		
				Jumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi / klarifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		
		4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Data KKP HAM dan Aksi Ham B4, B8 dan B12	10 Buku Laporan	10 Buku Laporan	151,577,712	10 Buku Laporan	166,735,483	10 Buku Laporan	183,409,032	10 Buku Laporan	201,749,935	10 Buku Laporan	221,924,928	10 Buku Laporan	244,117,421	10 Buku Laporan	1,169,514,510	BAGIAN HUKUM
				Jumlah perkara hukum pemerintah daerah yang diselesaikan	6 perkara	3 perkara		3 perkara		3 perkara		3 perkara		3 perkara		3 perkara		3 perkara		
		4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah berita daerah yang di publikasikan	0 Buku	250 Buku	56,800,888	50 Buku	62,480,977	50 Buku	68,729,074	50 Buku	75,601,982	50 Buku	83,162,180	50 Buku	91,478,398	50 Buku	438,253,499	BAGIAN HUKUM
				Jumlah sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan		1 kali														
				Jumlah lembaran daerah yang publikasi	250 Buku	250 Buku		250 Buku		250 Buku		250 Buku		250 Buku		250 Buku		250 Buku		
		4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	3 MOU	100%	41,234,442	5 MOU	45,357,886	5 MOU	49,893,675	5 MOU	54,883,042	5 MOU	60,371,347	5 MOU	66,408,481	5 MOU	318,148,873	
		4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah asistensi kerjasama daerah dengan pihak ketiga	3 MOU	5 MOU	41,234,442	5 MOU	45,357,886	5 MOU	49,893,675	5 MOU	54,883,042	5 MOU	60,371,347	5 MOU	66,408,481	5 MOU	318,148,873	BAGIAN TAPEM
Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah				Meningkatkan Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan			Nilai investasi Swasta dan Masyarakat		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	906,287,167	100%	996,915,884	100%	1,096,607,472	100%	1,206,268,219	100%	1,326,895,041	100%	1,459,584,545	100%	6,992,558,329	SEKRETARIAT DAERAH
		4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	178,383,644	100%	196,222,008	100%	215,844,209	100%	237,428,630	100%	261,171,493	100%	287,288,642	100%	1,376,338,627	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Jumlah Lembaga yang menjadi koordinasi pengawasan terhadap alokasi pendistribusian BBM tertentu	Kabupaten	15 Kecamatan		Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten		Kabupaten			
				Jumlah lembaga yang menjadi koordinasi pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan	Kabupaten	15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan		15 Kecamatan			
				Persentase pelaksanaan penghematan energi dan air oleh masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman, tenang dan Dinamis				Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman tenang dan dinamis	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas			Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Peran serta aparat Pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			Jumlah Konflik yang tertangani oleh Pemerintah Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Unsur Pemerintahan Umum																	
		8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2,102,788,533			2,102,788,533			2,102,788,533		2,102,788,533		2,102,788,533		2,102,788,533	KESBANGPOL	
		8 01 02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	85%	172,852,444	85%	172,852,444	85%	172,852,444	
		8 01 02 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase Peningkatan rasa kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	85%	172,852,444	85%	172,852,444	85%	172,852,444	85%	172,852,444	
		8 01 02 2.01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen dan laporan hasil pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Forum Pembauran kebangsaan	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	172,852,444	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	172,852,444	4 dokumen laporan	172,852,444	4 dokumen laporan	172,852,444	4 dokumen laporan	172,852,444	BAGIAN KESBANGPOL
		8 01 03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparat daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	
		8 01 03 2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kebijakan pemerintah dalam penanganan perkembangan politik di daerah	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	Kab. Pesisir Selatan	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	85%	1,137,057,271	BAGIAN KESBANGPOL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Parpol yang diverifikasi untuk penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai	Kab. Pesisir Selatan	13 parpol	1,073,967,539	Kab. Pesisir Selatan	13 parpol	1,073,967,539	Kab. Pesisir Selatan	13 parpol	1,073,967,539	1,073,967,539	1,073,967,539	13 parpol	13 parpol	13 parpol	1,073,967,539	BAGIAN KESBANGPOL
				Jumlah partai politik yang mendapat hibah bantuan keuangan partai politik	Kab. Pesisir Selatan	13 Parpol		Kab. Pesisir Selatan	13 Parpol		Kab. Pesisir Selatan	13 Parpol			13 Parpol	13 Parpol			13 Parpol	KESBANGPOL
		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen dan laporan hasil money di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	63,089,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	63,089,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	63,089,732	63,089,732	63,089,732	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	63,089,732	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase hasil Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasikemasyarakatan	Kab. Pesisir Selatan	85%	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	85%	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	85%	53,695,148	85%	53,695,148	85%	53,695,148	85%	53,695,148	BAGIAN KESBANGPOL
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pembinaan dan peningkatan kualitas komunikasi dengan Organisasi	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	53,695,148	12 Bulan	53,695,148	12 Bulan	53,695,148	12 Bulan	53,695,148	
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen hasil money Ormas/LSM yang mendapat pembinaan	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	53,695,148	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	53,695,148	53,695,148	53,695,148	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	53,695,148	BAGIAN KESBANGPOL
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Pesisir Selatan	85%	354,648,314	Kab. Pesisir Selatan	85%	354,648,314	Kab. Pesisir Selatan	85%	354,648,314	85%	354,648,314	85%	354,648,314	85%	354,648,314	BAGIAN KESBANGPOL
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	354,648,314	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	354,648,314	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	354,648,314	12 Bulan	354,648,314	12 Bulan	354,648,314	12 Bulan	354,648,314	KESBANGPOL
		8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah siswa yang mengikuti Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tingkat SLTA dan Nagari	Kab. Pesisir Selatan	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari		Kab. Pesisir Selatan	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari		Kab. Pesisir Selatan	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	75 Siswa per-Kecamatan dan 7 orang per-Nagari	
				Jumlah ASN dan Siswa yang mengikuti tes urine untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika	Kab. Pesisir Selatan	700 ASN dan 300 Siswa	281,858,582	Kab. Pesisir Selatan	700 ASN dan 300 Siswa	281,858,582	Kab. Pesisir Selatan	700 ASN dan 300 Siswa	281,858,582	281,858,582	281,858,582	700 ASN dan 300 Siswa	700 ASN dan 300 Siswa	700 ASN dan 300 Siswa	281,858,582	BAGIAN KESBANGPOL
				Pelaksanaan upacara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)	Kab. Pesisir Selatan	1 kegiatan		Kab. Pesisir Selatan	1 kegiatan		Kab. Pesisir Selatan	1 kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			BAGIAN KESBANGPOL
				Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	50 orang x 4 wilayah		Kab. Pesisir Selatan	50 orang x 4 wilayah		Kab. Pesisir Selatan	50 orang x 4 wilayah			50 orang x 4 wilayah	50 orang x 4 wilayah	50 orang x 4 wilayah			BAGIAN KESBANGPOL
				Jumlah dana hibah bantuan penanganan penyalahgunaan narkotika pada kepada Polres Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	1 paket		Kab. Pesisir Selatan	1 paket		Kab. Pesisir Selatan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket			KESBANGPOL
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen /laporan hasil Money di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	72,789,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	72,789,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	72,789,732	72,789,732	72,789,732	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan	72,789,732	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase hasil capaian Kondusifitas Pemerintah dalam bidang Perlindungan Masyarakat	Kab. Pesisir Selatan	85%	384,535,356	Kab. Pesisir Selatan	85%	384,535,356	Kab. Pesisir Selatan	85%	384,535,356	85%	384,535,356	85%	384,535,356	85%	384,535,356	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang tetangani melalui koordinasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional	Kab. Pesisir Selatan	4 Konflik	384,535,356	Kab. Pesisir Selatan	4 Konflik	384,535,356	Kab. Pesisir Selatan	4 Konflik	384,535,356	4 Konflik	384,535,356	4 Konflik	4 Konflik	4 Konflik	384,535,356	BAGIAN KESBANGPOL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	
						Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kab. Pesisir Selatan	35 kali	64,514,732	Kab. Pesisir Selatan	35 kali	64,514,732	Kab. Pesisir Selatan	35 kali	64,514,732	35 kali	64,514,732	35 kali	64,514,732	35 kali	64,514,732	BAGIAN KESBANGPOL	
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen /laporan hasil Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	227,863,892	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	227,863,892	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	227,863,892	4 dokumen laporan	227,863,892	4 dokumen laporan	227,863,892	4 dokumen laporan	227,863,892		227,863,892
				Jumlah Dokumen/Laporan hasil Rapat-rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		4 dokumen laporan							
				Jumlah Dokumen /Laporan hasil Rapat-rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		4 dokumen laporan							
				Jumlah Dokumen/laporan hasil Rapat-Rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan		4 dokumen laporan							
				Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dari Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Kab. Pesisir Selatan	21 rekomendasi	100 rekomendasi	Kab. Pesisir Selatan	21 rekomendasi	100 rekomendasi	Kab. Pesisir Selatan	21 rekomendasi	100 rekomendasi	21 rekomendasi	100 rekomendasi	21 rekomendasi	100 rekomendasi	21 rekomendasi	100 rekomendasi	21 rekomendasi	100 rekomendasi
				Jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk Penelitian	Kab. Pesisir Selatan	100 rekomendasi		Kab. Pesisir Selatan	100 rekomendasi		Kab. Pesisir Selatan	100 rekomendasi		100 rekomendasi							
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen/laporan hasil Monev di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	92,156,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	92,156,732	Kab. Pesisir Selatan	4 dokumen laporan	92,156,732	4 dokumen laporan	92,156,732	4 dokumen laporan	92,156,732	4 dokumen laporan	92,156,732	BAGIAN KESBANGPOL	
JUMLAH							38,276,740,531		42,104,414,584		46,314,856,043		50,946,341,647		56,040,975,811		61,645,073,393		295,328,402,008		



**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun RPJMD	TARGET					Komdisi Kerja Pada Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA								
1	Indek Reformasi Birokrasi	56	58	60	62	64	65	65	Bag. Organisasi
2	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	68,00 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	78 (BB)	Bag. Organisasi
3	Skor Nilai LPPD	3209	3215	3223	3229	3234	3240	3240	Bag. PUM
4	Indeks Kelembagaan	-	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	Bag. Organisasi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	B (80.00)	B (82.00)	B (84.00)	B (85.00)	B (85.00)	B (85.00)	B (85.00)	Bag. Organisasi
6	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%	100%	Bag. Kesra
7	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	Bag. Kesra
8	Jumlah prestasi tingkat provinsi dan nasional	5 Cabang	-	6 Cabang	-	7 Cabang	-	-	Bag. Kesra
9	Persentase kasus perceraian terhadap jumlah keluarga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Bag. Kesra
10	Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan kejahatan	268 Org	258 Org	248 Org	238 Org	228 Org	200 Org	200 Org	Bag. Kesbangpol
B	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN DAERAH (Formula Setiap Indikator Agar Mepedomani Permendagri 18 Tahun 2020) (Apabila data yang telah tersaji tidak sesuai, agar OPD terkait melakukan penyempurnaan dengan data yang terakurat)								
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN								

5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
a	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Izin di Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Urusan Pengadaan								
a	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0	0	0	0	0	0	0	Bag. PBJ
b	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	25%	30%	35%	35%	40%	40%	40%	Bag. PBJ
c	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bag. PBJ

BAB VIII**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Painan,**2021****Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN****Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
NIP. 19701006 198908 1 001**